

# INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN LEBONG 2017



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN LEBONG**

# INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN LEBONG 2017



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN LEBONG**

# **INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN LEBONG 2017**

ISBN : 978-602-6853-94-3  
Katalog BPS : 4102002.1707  
Nomor Publikasi : 17070.1822  
Ukuran Buku : 21,59 cm x 27,94 cm  
Jumlah Halaman : viii + 46

Naskah :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebong

Gambar Kulit :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebong

Diterbitkan Oleh :

© Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebong

Dicetak Oleh :

Perum Percetakan Negara RI Cabang Bengkulu

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebong

**Tim Penyusun :**

Penanggung Jawab Umum :

Ir. Sriwiyana Teguh Ananto, M.Si

Penanggung Jawab Teknis :

Ir. Sriwiyana Teguh Ananto, M.Si

Penulis :

Ujang Arlian, S.E., M.M.

<https://lebongkab.bps.go.id>

# KATA PENGANTAR

Pembangunan manusia adalah suatu proses pembangunan yang bertujuan agar setiap manusia mempunyai lebih banyak pilihan, khususnya dalam kesehatan, pendidikan dan pendapatan. Pembangunan manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi umur panjang dan hidup sehat direpresentasikan oleh indikator Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir, dimensi pengetahuan direpresentasikan oleh indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS), serta dimensi standar hidup layak direpresentasikan oleh indikator Pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Semua indikator yang merepresentasikan ketiga dimensi pembangunan manusia ini terangkum dalam satu nilai tunggal, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Penyajian angka IPM menurut daerah memungkinkan setiap provinsi dan kabupaten/kota mengetahui peta pembangunan manusia baik pencapaian, posisi maupun disparitas antar daerah. Dengan ini, maka diharapkan agar daerah dapat terpacu untuk berupaya meningkatkan kinerja pembangunan melalui peningkatan kapasitas dasar penduduk. Semoga publikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lebong Tahun 2017 ini bermanfaat bagi semua kalangan yang berkepentingan termasuk masyarakat pengguna sebagai bahan rujukan.

Tubei, November 2018  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Kabupaten Lebong

**Ir. Sriwiyana Teguh Ananto, M.Si**



# DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN DALAM .....	ii
KETERANGAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB 1. PENDAHULUAN.....	3
1.1. Latar Belakang .....	3
1.2. Maksud dan Tujuan.....	7
BAB 2. METODOLOGI .....	11
2.1. Metode Penghitungan.....	11
2.2. Komponen IPM .....	14
2.3. Klasifikasi/Pengelompokan IPM .....	18
2.4. Sumber Data IPM.....	19
BAB 3. GAMBARAN UMUM KABUPATEN LEBONG .....	23
3.1. Keadaan Geografis .....	23
3.2. Penduduk .....	24
3.3. Kesehatan .....	27
3.4. Pendidikan .....	32
3.5. Perekonomian Regional .....	34

BAB 4. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN LEBONG	39
4.1. Perkembangan IPM Kabupaten Lebong 2013-2017 .....	39
4.2. Perkembangan Komponen IPM Kabupaten Lebong.....	40
4.3. Perbandingan IPM Antar Kabupaten/Kota .....	45
BAB 5. PENUTUP .....	54
5.1. Kesimpulan.....	54
5.2. Implikasi Kebijakan .....	55

<https://lebongkab.bps.go.id>

# DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Nilai Maksimum, Nilai Minimum dan Range Pencapaian Indikator Komponen IPM.....	13
Tabel 2. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan, 2017 .....	25
Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 2017 .....	26
Tabel 4. Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Jenis dan Pelayanan Kesehatan Kecamatan di Kabupaten Lebong 2017 .....	29
Tabel 5. Banyaknya Guru Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Lebong Tahun 2017 .....	34
Tabel 6. Indeks Pembangunan Manusia dan Komponennya di Kabupaten Lebong Tahun 2012-2017.....	40
Tabel 7. Angka Harapan Hidup (AHH) dan Indeks Kesehatan Kabupaten Lebong Tahun 2012-2017.....	41
Tabel 8. Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Lebong Tahun 2013-2017.....	42

Tabel 9.	Indeks Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah dan Pendidikan Kabupaten Lebong Tahun 2013-2017 .....	43
Tabel 10.	Indikator dan Indeks Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten Lebong Tahun 2013-2017 .....	44
Tabel 11.	Angka IPM dan Peringkat IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2017.....	47

<https://lebongkab.bps.go.id>

# DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Lebong .....	24
Gambar 2. Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Jenisnya di Kabupaten Lebong Tahun 2017 .....	31
Gambar 3. Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Lebong Tahun 2017 .....	33
Gambar 4. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Lebong Tahun 2011-2015 .....	35
Gambar 5. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lebong Tahun 2013-2017.....	46
Gambar 6. Kuadran Angka Harapan Hidup (AHH) Antar Kabupaten/Kota Tahun 2017 .....	48
Gambar 7. Kuadran Rara-rata Lama Sekolah (RLS) Antar Kabupaten/Kota Tahun 2017 .....	49
Gambar 8. Kuadran Harapan Lama Sekolah (HLS) Antar Kabupaten/Kota Tahun 2017 .....	50
Gambar 9. Kuadran Pengeluaran Per Kapita Antar Kabupaten/Kota Tahun 2017 .....	51



# Bab I

## Pendahuluan

---

<https://lebongkab.bps.go.id>



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya diukur melalui berhasilnya pembangunan fisik, melainkan juga pencapaian dalam pembangunan non fisik. Jika keberhasilan pembangunan fisik bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan per kapita, maka pembangunan non fisik lebih menekankan pada aspek pembangunan manusia. Dalam menghadapi pasar bebas seperti saat ini, sangat diperlukan sumber daya manusia yang mampu bersaing ketat di dalamnya. Untuk itu, pemerintah perlu lebih memfokuskan pada pembangunan yang terpusat pada manusianya sendiri.

Seiring reformasi pembangunan, tampak bahwa paradigma pembangunan di dunia telah bergeser. Pergeseran paradigma ini bertolak dari kenyataan bahwa pembangunan tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan hasil produksi dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Jika dilihat dari perubahan konsep di dunia, pada awal dekade 70-an banyak pendapat mengemukakan bahwa pertumbuhan produksi merupakan syarat bagi kesejahteraan masyarakat, namun hasilnya belum memadai. Pada dekade itu juga ditekankan pada distribusi hasil-hasil pembangunan (*distribution-growth development*). Selanjutnya pada awal dekade 80-an muncul paradigma

pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need development*), dan akhir-akhir ini sejak tahun 90-an paradigma pembangunan terpusat pada aspek manusia (*human centered development*).

Dalam konteks tersebut, UNDP (*United Nations Development Programme*) menganggap bahwa pembangunan manusia dapat dilihat sebagai proses upaya agar penduduk memperoleh “perluasan pikiran” dan sekaligus sebagai taraf kehidupan yang dicapai dari upaya tersebut. Pada saat yang sama pembangunan manusia dapat dilihat juga sebagai pembangunan kemampuan manusia melalui perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan dan keterampilan, sekaligus sebagai pemanfaatan kemampuan/keterampilan tersebut. Konsep pembangunan manusia ini lebih luas pengertiannya dibanding konsep pembangunan ekonomi yang menekankan pada pertumbuhan, kebutuhan dasar, kesejahteraan masyarakat, atau pembangunan sumber daya manusia.

Manusia merupakan subyek dan sekaligus obyek dari pembangunan. Sebagai subyek dari pembangunan artinya manusia sebagai pelaku dari jalannya roda pembangunan disuatu daerah. Sedangkan manusia sebagai obyek dari pembangunan artinya manusia menjadi faktor yang dituju dari beberapa pembangunan yang ada untuk peningkatan kualitas pembangunan manusia. Pembangunan manusia merupakan upaya untuk meningkatkan kehidupan yang lebih layak bagi penduduk di suatu daerah, yaitu melalui perencanaan program-program pembangunan daerah.

Sebagaimana dinyatakan dalam *Human Development Report (HDR)* pertama yang dipublikasikan oleh UNDP, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki manusia. Di antara pilihan tersebut, pilihan terpenting adalah untuk berumur panjang, sehat, berilmu pengetahuan dan untuk memperoleh akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar hidup secara layak.

Pendekatan pembangunan manusia menggabungkan berbagai aspek meliputi produksi, distribusi komoditas, peningkatan kemampuan manusia dan secara bersamaan mengakomodir berbagai isu di masyarakat seperti pertumbuhan ekonomi, ketenagakerjaan, perdagangan, kebebasan berpolitik, serta isu gender ataupun nilai-nilai kultural. Menurut HDR, ada empat komponen penting dalam paradigma pembangunan manusia, yaitu produktifitas (*productivity*), pemerataan (*equity*), kesinambungan (*sustainability*) dan pemberdayaan (*empowerment*). Dalam pelaksanaannya, untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan terhadap hasil pembangunan manusia diperlukan suatu ukuran tertentu. Ukuran atau indikator tersebut sifatnya haruslah angka tunggal (indikator komposit) yang dapat menggambarkan berbagai indikator tertentu.

Sejak tahun 1990, UNDP telah menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index (HDI)* yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia di suatu daerah. Pengukuran IPM difokuskan pada tiga dimensi yang dianggap esensial bagi kehidupan manusia

yaitu usia hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup layak (*decent living standards*).

UNDP merekomendasikan bahwa tingkat keberhasilan pembangunan suatu negara secara minimal direfleksikan dengan tingkat pemenuhan tiga unsur, yaitu peluang berumur panjang dan sehat, berpengetahuan dan keterampilan yang memadai, serta peluang untuk mendayagunakan pengetahuan yang dimiliki dalam kegiatan produktif. Berdasarkan tiga unsur tersebut, maka diperoleh indikator-indikator berupa angka harapan hidup (*life expectancy at age 0*) yang mengukur tingkat kesehatan masyarakat, harapan lama sekolah (*expected years of schooling*) dan rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) untuk mengukur tingkat pendidikan dan keterampilan, serta pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity-ppp*) yang merupakan ukuran pengeluaran per kapita yang disesuaikan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. IPM itu sendiri merupakan indeks komposit dari ketiga indikator di atas.

Mulai tahun 2014 penghitungan IPM menggunakan metode baru, dimana angka melek huruf dewasa (*adult literacy rate*) pada metode lama diganti dengan angka harapan lama sekolah (*expected years of schooling*), pada penghitungan pengeluaran per kapita yang disesuaikan yang sebelumnya menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*purchasing power parity*) dan juga metode penghitungan diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata

geometrik.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Berbagai program pembangunan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk harus selalu dievaluasi menggunakan berbagai indikator. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu kajian analisis kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas penduduk. Oleh karena itu, maksud dan tujuan pengukuran IPM Kabupaten Lebong adalah sebagai berikut:

1. Mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi.
2. Sebagai salah satu alat ukur kinerja suatu daerah, terutama dalam hal evaluasi proses pembangunan sumber daya manusia.
3. Sebagai alat untuk mempersiapkan kemajuan pembangunan antar kabupaten di suatu wilayah tertentu.
4. Sebagai input dan output terhadap kebijakan dan pelaksanaan pembangunan yang telah, sedang dan akan dilakukan.
5. Sebagai salah satu indikator dalam penyusunan Dana Alokasi Umum (DAU).
6. Sebagai bahan acuan bagi para peneliti, cendikiawan, pelaku ekonomi dan konsumen data dalam pelaksanaan riset maupun sumber pustaka.

7. Sebagai bahan kajian yang bersifat analisis terhadap kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas penduduk.
8. Tersedianya berbagai indikator pembangunan manusia yang berguna dalam pelaksanaan evaluasi dan perencanaan pembangunan yang berjarak dengan indikator pertumbuhan ekonomi daerah.
9. Sebagai acuan penajaman prioritas pembangunan. Artinya, perubahan pola penganggaran pembangunan yang selama ini menggunakan aturan kesepakatan dari pihak penentu ke pola pembangunan yang lebih memihak orang banyak. Dengan demikian, kegiatan pembangunan lebih diarahkan pada aspek efisiensi dan efektivitas anggaran.



# **Bab II**

# **Metodologi**

---

<https://lebongkab.bps.go.id>



# BAB 2

## METODOLOGI

### 2.1. Metode Penghitungan

Mulai tahun 2014 Badan Pusat Statistik (BPS) menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menggunakan metode baru. Penggunaan metode baru ini dikarenakan 2 alasan, yaitu : Pertama, beberapa indikator sudah tidak tepat digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf disebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Alasan kedua adalah penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah disuatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

Dalam metode baru ini yang berubah adalah Indikator Angka Melek Huruf pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah dan juga Indikator Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan rata-rata pengeluaran perkapita yang diperoleh dari data Susenas. Selain itu metode

penghitungan juga mengalami perubahan, yaitu metode agregasi dengan rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik.

Dengan menggunakan metode baru ini ada beberapa keunggulan yang dimiliki, yaitu : Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi dan juga rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Selain itu juga dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam penyusunan IPM dapat diartikan bahwa pencapaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya. Metode baru digunakan oleh BPS dalam menghitung IPM ini sama dengan Standar *United Nations Development Programme (UNDP)*.

IPM diperoleh melalui dua tahapan sebagai berikut:

1. Menghitung indeks masing-masing komponen pembentuk IPM, meliputi Indeks Kesehatan ( $I_{kesehatan}$ ), Indeks Pendidikan ( $I_{pendidikan}$ ) dan Indeks Pengeluaran. Adapun rumus penghitungan indeks masing-masing komponen IPM adalah:

Keterangan:

$X_i$  = Indikator Komponen IPM ke- $i$  ( $i = 1,2,3$ )

$X_{min}$  = Nilai Minimum dari  $X_i$

$X_{maks}$  = Nilai Maksimum dari  $X_i$

Besarnya nilai minimum dan maksimum adalah berdasarkan standar dari UNDP dan akan menghasilkan angka .

Tabel 1. Nilai Maksimum, Nilai Minimum dan Range Pencapaian Indikator Komponen IPM

<b>Indikator</b>	<b>Satuan</b>	<b>Nilai Minimum</b>	<b>Nilai Maksimum</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
Angka Harapan Hidup saat Lahir	Tahun	20	85
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	0	18
Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	0	15
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	Rupiah (Rp)	1.007.436*	26.572.352**

Keterangan:

\* Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua

\*\* Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025

2. Menghitung IPM dengan menggunakan rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan dan pengeluaran menggunakan rumus :

---

Keterangan:

$I_{\text{kesehatan}}$  = Indeks Kesehatan

$I_{\text{pendidikan}}$  = Indeks Pendidikan, yaitu :  $1/2 I_{HLS}$  (Indeks Harapan Lama Sekolah) +  $1/2 I_{RLS}$  (Indeks Rata-Rata Lama Sekolah)

$I_{\text{pengeluaran}}$  = Indeks Pengeluaran

## 2.2. Komponen IPM

IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata geometrik dari Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan dan Indeks Pengeluaran. Komponen penyusun indeks-indeks tersebut meliputi Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Pengeluaran per kapita disesuaikan.

### a. Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)

Angka Harapan Hidup saat lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir, dimana AHH ini

dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan . AHH ini mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Semakin baik kesehatan maka kecenderungan hidup lebih lama akan semakin tinggi dan juga sebaliknya semakin buruk kesehatan maka kematian akan semakin dekat.

Untuk menghitung AHH digunakan asumsi TFR dan IMR dari Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) dan asumsi migrasi dari SP2010. Prosedur penghitungan angka harapan hidup sejak lahir ( $AHH_0$ ) dilakukan dengan menggunakan proyeksi *cohort-component* untuk nasional dan provinsi serta dasar proyeksi provinsi untuk estimasi kabupaten/kota.

Setelah mendapatkan angka harapan hidup sejak lahir, selanjutnya dihitung Indeks Kesehatan ( $I_{\text{kesehatan}}$ ) yaitu dengan membandingkan angka tersebut dengan angka yang sudah distandarkan (dalam hal ini UNDP atau BPS telah menetapkan nilai minimum dan nilai maksimum untuk angka harapan hidup yaitu masing-masing 20 tahun dan 85 tahun). Formula Indeks Kesehatan adalah sebagai berikut:

---

Keterangan:

$AHH$  = Angka Harapan Hidup Tahun ke- $t$

$AHH_{min}$  = Angka Harapan Hidup Minimum (20)

$AHH_{max}$  = Angka Harapan Hidup Maksimum (85)

## **b. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)**

### **b.1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)**

Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun keatas.

Setelah mendapatkan rata-rata lama sekolah, selanjutnya dihitung Indeks Rata-rata Lama Sekolah ( $I_{RLS}$ ) yaitu dengan membandingkan angka tersebut dengan angka yang sudah distandarkan (dalam hal ini UNDP atau BPS telah menetapkan nilai minimum dan nilai maksimum untuk rata-rata lama sekolah yaitu masing-masing 0 tahun dan 15 tahun). Formula Indeks Rata-rata Lama Sekolah adalah sebagai berikut:

---

Keterangan:

$RLS$  = Rata-rata Lama Sekolah Tahun ke- $t$

$RLS_{min}$  = Rata-rata Lama Sekolah Minimum (0)

$RLS_{max}$  = Rata-rata Lama Sekolah Maksimum (15)

## b.2. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun keatas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Setelah mendapatkan angka harapan lama sekolah, selanjutnya dihitung Indeks Harapan Lama Sekolah ( $I_{HLS}$ ) yaitu dengan membandingkan angka tersebut dengan angka yang sudah distandarkan (dalam hal ini UNDP atau BPS telah menetapkan nilai minimum dan nilai maksimum untuk harapan lama sekolah yaitu masing-masing 0 tahun dan 18 tahun). Formula Indeks Harapan Lama Sekolah adalah sebagai berikut:

---

Keterangan:

$HLS$  = Harapan Lama Sekolah Tahun ke- $t$

$HLS_{min}$  = Harapan Lama Sekolah Minimum (0)

$HLS_{max}$  = Harapan Lama Sekolah Maksimum (18)

### **b.3. Indeks Pendidikan (Indeks RLS + Indeks HLS)**

Untuk memperoleh Indeks Pendidikan, Indeks Rata-rata Lama Sekolah dan Indeks Harapan Lama Sekolah dijumlahkan kemudian dibagi 2 sehingga diperoleh formula Indeks Pendidikan ( $I_{\text{Pendidikan}}$ ) sebagai berikut:

—

### **c. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan**

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity-PPP*). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kabupaten/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas non makanan. Metode penghitungan paritas daya beli menggunakan metode Rao.

### **2.3. Klasifikasi/Pengelompokan IPM**

Menurut *United Nations Development Programme (UNDP)*, besaran angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diklasifikasikan menjadi empat kategori sbb:

1.  $IPM < 60$  : IPM Rendah

2.  $60 \leq \text{IPM} < 70$  : IPM Sedang
3.  $70 \leq \text{IPM} < 80$  : IPM Tinggi
4.  $\text{IPM} \geq 80$  : IPM Sangat Tinggi

Selain itu, untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan IPM per tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhannya, semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya.

Adapun formula penghitungannya adalah sebagai berikut:

---

Keterangan:

$IPM_t$  = Indeks Pembangunan Manusia tahun ke  $t$

$IPM_{t-1}$  = Indeks Pembangunan Manusia tahun ke  $t-1$

#### 2.4. Sumber Data IPM

Sumber data dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu :

- Angka harapan hidup saat lahir (Sensus Penduduk 2010-SP2010, Proyeksi Penduduk)
- Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (Survei Sosial

Ekonomi Nasional-SUSENAS)

- PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga diproksi dengan pengeluaran per kapita disesuaikan menggunakan data SUSENAS
- Penentuan nilai maksimum dan minimum menggunakan Standar UNDP untuk keterbandingan global, kecuali standar hidup layak karena menggunakan ukuran rupiah



# **Bab III**

## **Gambaran Umum**

---

<https://lebongkab.bps.go.id>



# BAB 3

## GAMBARAN UMUM

### 3.1. Keadaan Geografis

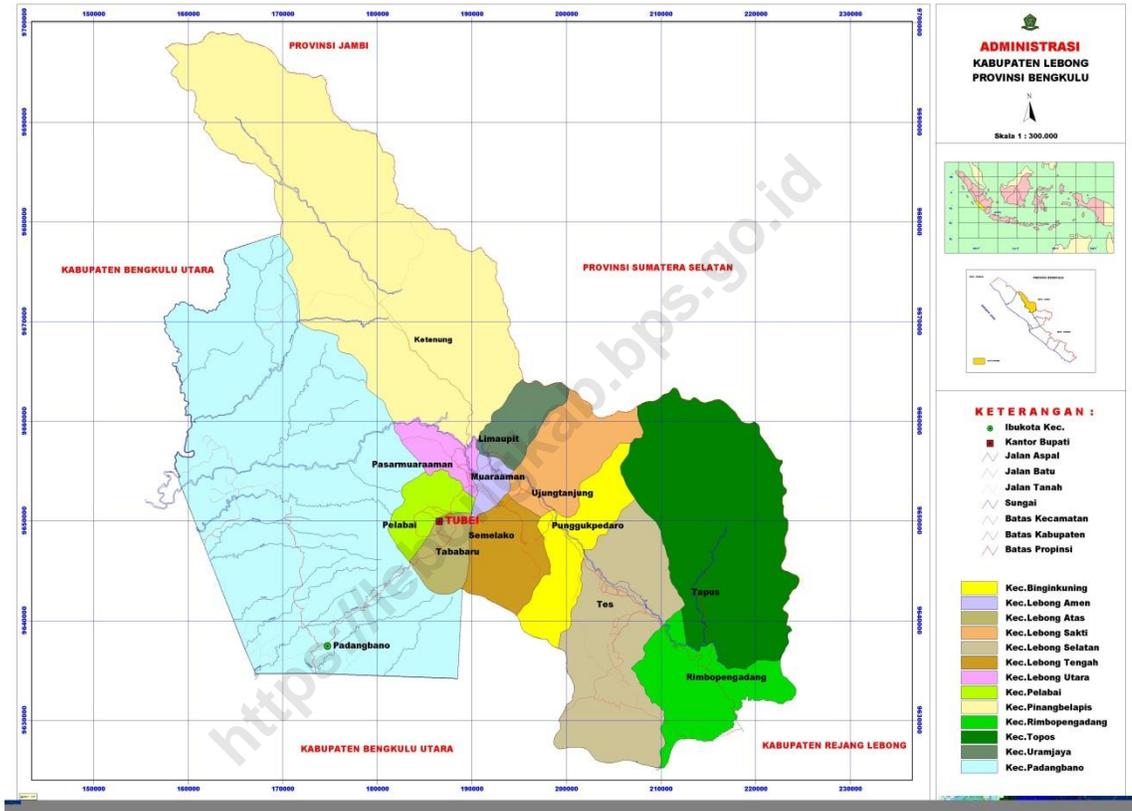
Kabupaten Lebong terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu. Wilayah Kabupaten Lebong sendiri pada awalnya merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Kabupaten Lebong terletak di sebelah barat pegunungan barisan dan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan di sebelah timur, sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Jambi, sebelah selatan Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Bengkulu Utara di sebelah baratnya.

Kabupaten Lebong memiliki luas wilayah, yaitu 159,472 Km<sup>2</sup>, yang terdiri dari 12 kecamatan yaitu Kecamatan Topos, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kecamatan Lebong Selatan, Kecamatan Bingin Kuning, Kecamatan Lebong Sakti, Kecamatan Lebong Tengah, Kecamatan Uram Jaya, Kecamatan Amen, Kecamatan Lebong Utara, Kecamatan Pinang Belapis, Kecamatan Lebong Atas, dan Kecamatan Pelabai.

Ibukota Kabupaten Lebong terletak di Tubei yang berada di Kecamatan Pelabai dan pusat perekonomiannya terletak di Kecamatan Lebong Utara. Wilayahnya terbagi menjadi 93 desa dan 11 kelurahan. Berdasarkan topografinya,

hampir separuh wilayah Kabupaten Lebong terletak di dataran tinggi, yaitu pada ketinggian di atas 500 meter.

Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Lebong



### 3.2. Penduduk

Pada tahun 2017 jumlah penduduk Kabupaten Lebong adalah 107.600 jiwa, terdiri dari laki-laki 54.617 jiwa dan perempuan 52.983 jiwa sehingga rasio jenis kelamin sebesar 104. Untuk sebaran penduduk pada setiap kecamatannya yaitu penduduk terbanyak berada di Kecamatan Lebong Utara dengan jumlah

17.236 jiwa, kemudian disusul penduduk di Kecamatan Lebong Selatan 15.494 jiwa. Persebaran penduduk selengkapnya adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin menurut Kecamatan

Kecamatan	Jenis Kelamin			Rasio Jenis Kelamin
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rimbo Pengadang	2 621	2 484	5 105	106
Topos	3 256	3 197	6 453	102
Lebong Selatan	7 914	7 580	15 494	104
Bingin Kuning	5 500	5 402	10 902	102
Lebong Tengah	5 672	5 528	11 200	103
Lebong Sakti	4 799	4 755	9 554	101
Lebong Atas	2 802	2 654	5 456	106
Pelabai	3 903	3 699	7 602	106
Lebong Utara	8 692	8 544	17 236	102
Amen	4 038	3 945	7 983	102
Uram Jaya	2 834	2 848	5 682	100
Pinang Belapis	2 586	2 347	4 933	110
Lebong	54 617	52 983	107 600	104

Sumber : Lebong Dalam Angka 2018

Tabel 3. Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	5,006	4,932	9,938
5-9	5,342	5,043	10,385
10-14	5,124	5,036	10,160
15-19	4,870	4,551	9,421
20-24	4,583	4,236	8,819
25-29	4,820	4,636	9,456
30-34	4,421	4,457	8,878
35-39	4,601	4,304	8,905
40-44	3,726	3,758	7,484
45-49	3,349	3,185	6,534
50-54	2,996	2,737	5,733
55-59	2,184	2,026	4,210
60-64	1,449	1,352	2,801
65-69	908	917	1,825
70-74	626	816	1,442
75+	612	997	1,609
Jumlah	54,617	52,983	107,600

Sumber : Lebong Dalam Angka 2018

### **3.3. Kesehatan**

Salah satu indikator penting yang dapat dijadikan salah satu ukuran dalam menggambarkan tingkat kesejahteraan penduduk adalah kesehatan. Undang-Undang Kesehatan No.23 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa pembangunan di bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat dalam rangka tercapainya hidup sehat. Selanjutnya, tujuan utama pembangunan di bidang kesehatan antara lain adalah menurunnya angka kesakitan dan meningkatnya status gizi penduduk. Peningkatan taraf kesehatan penduduk akan berdampak pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan kualitas SDM akan meningkatkan produktivitas penduduk yang bekerja.

Penduduk Kabupaten Lebong memiliki derajat kesehatan yang terus mengalami peningkatan, hal ini ditandai dengan meningkatnya angka harapan hidup. Angka harapan hidup Kabupaten Lebong tahun 2017 sebesar 62,46 meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang sebesar 62,39 tahun. Derajat kesehatan dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah ketersediaan layanan kesehatan, sanitasi lingkungan, dan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat.

#### **Pelayanan Kesehatan**

Pelayanan kesehatan di Kabupaten Lebong mencakup aspek ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan. Dilihat dari akses terhadap fasilitas

kesehatan, pada tahun 2017 fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Lebong, yaitu : satu unit rumah sakit umum, 13 unit puskesmas dan 27 unit puskesmas pembantu yang tersebar di 12 kecamatan. Selain itu juga didukung oleh keberadaan 22 poskesdes, 117 posyandu, dan empat apotek.

Untuk melayani masyarakat Lebong dibidang kesehatan, pada tahun 2017 terdapat enam orang dokter umum, 25 orang sarjana keperawatan, 99 orang paramedik perawat, 49 orang bidan, dua orang tenaga kefarmasian, sembilan orang tenaga gizi, 33 orang sarjana kesehatan masyarakat, dan satu orang sarjana sanitasi. Fasilitas pelayanan kesehatan tersebut tersebar di kecamatan sebagai berikut:

Tabel 4. Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Jenis dan Pelayanan Kesehatan  
Kecamatan di Kabupaten Lebong, 2017

KECAMATAN	DOKTER UMUM/ GIGI/ SPESIALIS	SARJANA KEPERAWA TAN	PARAMEDIK PERAWAT	BIDAN	TENAGA KEFARMA SIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Rimbo Pengadang	1	1	14	8	3
Topos	1	3	12	13	-
Lebong Selatan	1	7	15	18	3
Bingin Kuning	-	-	6	2	-
Lebong Sakti	1	1	14	8	-
Lebong Tengah	-	-	4	7	-
Amen	1	4	10	8	2
Uram Jaya	-	4	3	5	-
Lebong Utara	2	4	8	23	-
Pinang Belapis	2	2	3	10	1
Pelabai	-	4	9	9	-
Lebong Atas	1	4	12	8	-
Rumah Sakit	17	-	12	25	2

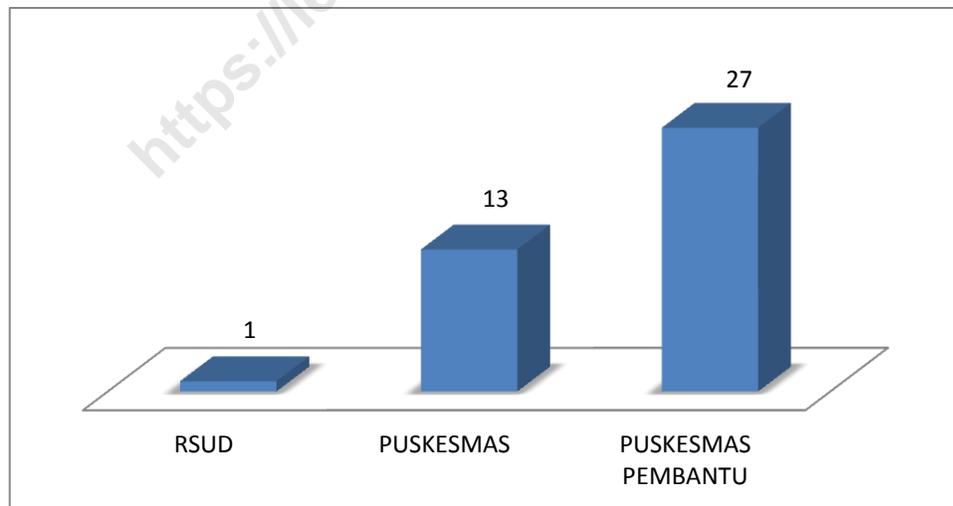
Lanjutan tabel

KECAMATAN	TENAGA GIZI	SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT	SARJANA SANITASI	TENAGA TEKNIS MEDIS	TENAGA KESEHATAN LAIN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Rimbo Pengadang	1	2	-	-	-
Topos	-	2	-	-	-
Lebong Selatan	2	2	1	1	-
Bingin Kuning	1	2	-	1	-
Lebong Sakti	-	2	-	-	-
Lebong Tengah	1	2	-	-	-
Amen	1	6	-	1	-
Uram Jaya	1	4	-	2	-
Lebong Utara	2	6	1	-	-
Pinang Belapis	-	2	-	-	-
Pelabai	1	1	-	-	-
Lebong Atas	1	3	1	-	-
Rumah Sakit	1	4	-	-	4

Selama tahun 2017 banyaknya kelahiran bayi di Kabupaten Lebong berjumlah 1.843 kelahiran dan semua kelahiran tersebut dibantu oleh tenaga kesehatan.

Jika dilihat dari pelayanan imunisasi, selama tahun 2017 realisasi dari pelayanan imunisasi sudah cukup baik. Jenis imunisasi tersebut yaitu DPT HB/ HB I, DPT HB/ HB II, DPT HB/ HB III, TT Ibu Hamil I, TT Ibu Hamil II, Polio I, Polio II, Polio III, Polio IV, Measless (Campak), Bias I (Campak), , Bias II (DT Kelas I), dan Bias II (TD Kelas II). Namun untuk imunisasi jenis Bias II (TD Kelas III) tidak tersedia ditahun 2017. Berdasarkan data imunisasi ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Lebong sadar akan pentingnya imunisasi bagi tumbuh kembang dan kesehatan balita mereka.

Gambar 2. Jumlah Sarana Kesehatan Menurut Jenisnya di Kabupaten Lebong Tahun 2017



Sumber : Lebong Dalam Angka 2018

### **3.4. Pendidikan**

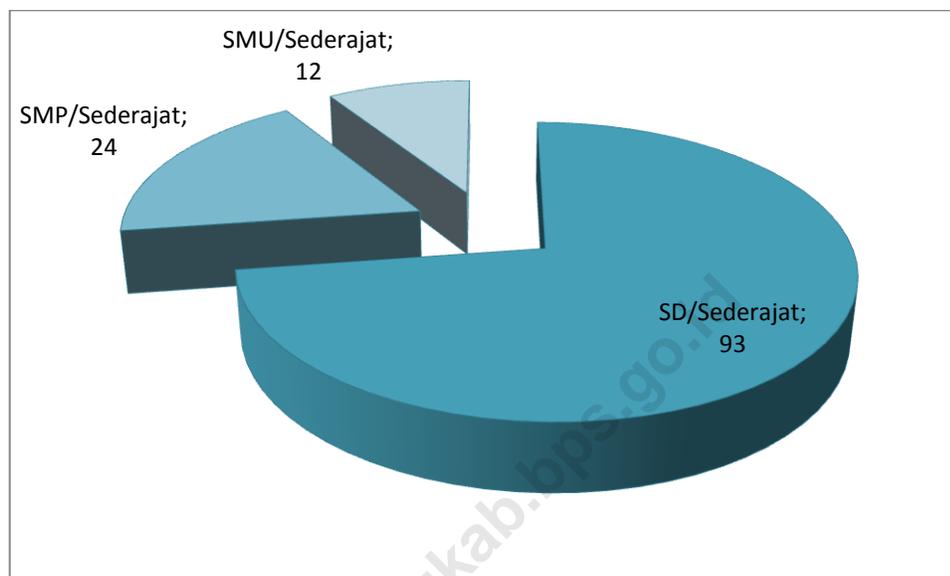
Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul merupakan faktor mendasar kemajuan suatu bangsa dan tidak semata-mata tergantung pada keunggulan sumber daya alamnya. SDM yang bermutu dalam pengertian teknis, kemampuan, keahlian, keterampilan serta nilai-nilai modern lainnya tetap diperlukan dan akan menjadi prasyarat mutlak untuk dapat mencapai keunggulan bagi suatu bangsa.

Pergeseran struktur masyarakat juga memiliki dampak mendasar dan berimplikasi terhadap terjadinya transisi kualifikasi SDM yang dibutuhkan. Pergeseran struktur masyarakat dari struktur tradisional ke struktur industri ditandai dari berkurangnya jenis pekerjaan pada sektor pertanian dan bertambahnya jenis pekerjaan pada sektor industri.

Ke depannya, jenis pekerjaan tradisional yang mengandalkan keterampilan motoris akan tergantikan oleh jenis pekerjaan yang berlandaskan pada otomatisasi dan pengolahan informasi. Oleh karena itu, upaya memperbaiki profil pendidikan sudah merupakan suatu gejala universal. Pendidikan adalah suatu bentuk investasi yang produktif dan dipandang sebagai sarana untuk memasuki lingkungan kerja yang bersifat modern.

Untuk melihat sejauh mana pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Lebong sudah mencapai sasaran, dapat ditunjukkan melalui beberapa indikator, di antaranya adalah ketersediaan sekolah, tenaga pengajar, serta jenjang pendidikan yang ditamatkan.

Gambar 3. Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Lebong Tahun 2017



Sumber : Lebong Dalam Angka 2017

Berdasarkan Gambar 3 di atas terlihat bahwa jumlah sekolah menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Lebong tahun 2017 adalah 93 SD, 24 SMP dan 12 SMU/SMK baik swasta maupun negeri. Sebagian besar sekolah-sekolah tersebut terletak di Kecamatan Lebong Utara dan Kecamatan Lebong Selatan.

Selain melihat jumlah sekolah, ketersediaan tenaga pengajar juga harus diperhatikan karena kualitas siswa berhubungan positif dengan kualitas dan kuantitas guru. Penyebaran tenaga guru yang merata baik di daerah pedesaan maupun perkotaan juga akan mampu mengurangi kesenjangan pendidikan antara perkotaan dan pedesaan. Tabel 5 berikut menunjukkan bahwa pada tahun 2017 jumlah guru di Kabupaten Lebong mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 5. Banyaknya Guru Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Lebong Tahun 2017

Tingkat Pendidikan	Tahun		
	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	1129	886	827
SMP	477	482	354
SMU	NA	NA	NA
SMK	154	NA	NA

Sumber : Lebong Dalam Angka 2017

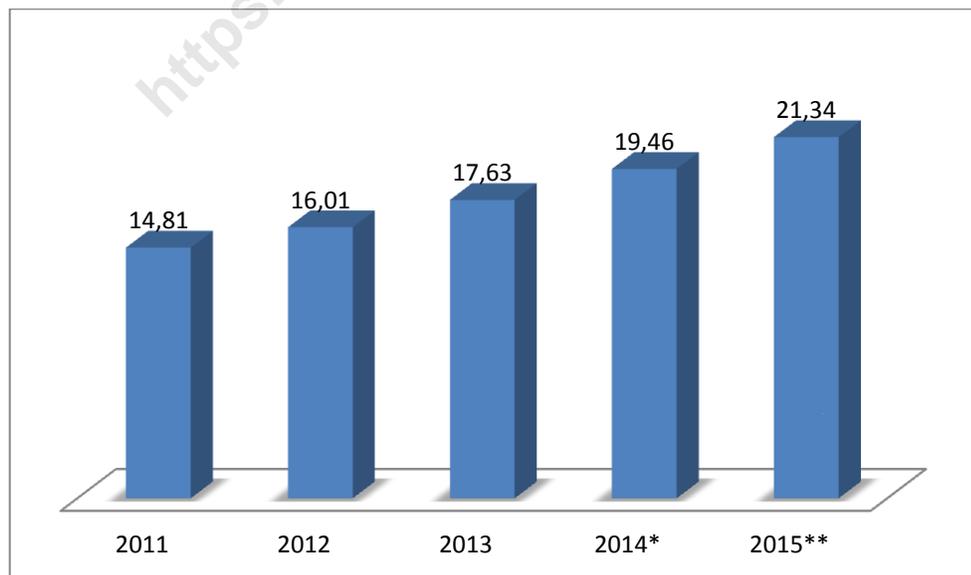
### 3.5. Perekonomian Regional

Pada tahun 2017 perekonomian Kabupaten Lebong mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari besaran Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Kabupaten Lebong tahun 2017 sebesar Rp. 2.854.019,1 juta yang mengalami peningkatan sebesar 10,02 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 2.594.015,9 juta. PDRB ADHB Kabupaten Lebong tahun 2017 masih didominasi oleh Sektor Pertanian. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memberikan kontribusi sebanyak 42,65 persen dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lebong tahun 2017. Sektor-sektor lain yang memberikan kontribusi cukup besar antara lain Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 11,18 persen.

Bila dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 (PDRB ADHK), pada tahun 2017 Kabupaten Lebong juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif yaitu sebesar 5,14 persen. Secara sektoral, masing-masing sektor ekonomi di Kabupaten Lebong tahun 2017 juga tumbuh positif. Sektor yang paling besar mengalami pertumbuhan adalah Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,90 persen. Selanjutnya, Sektor Jasa Lainnya tumbuh 8,85 persen, diikuti oleh Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang tumbuh 8,57 persen.

- **PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Lebong**

Gambar 4. PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Lebong (Juta Rupiah), Tahun 2011-2015



\*) Angka Sementara

\*\*\*) Angka Sangat Sementara

Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lebong Menurut Lapangan Usaha 2011 – 2016

Bila dilihat dari gambar 4, berdasarkan nilai PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lebong, secara umum nilai PDB per satu orang penduduk Kabupaten Lebong tahun 2015 mengalami peningkatan dibanding tahun 2014. Pada tahun 2014 PDRB per kapita penduduk Kabupaten Lebong sebesar Rp. 19,46 juta sedangkan pada tahun 2016 terjadi peningkatan sebesar 9,66 persen menjadi Rp. 21,34 juta.

<https://lebongkab.bps.go.id>



# **Bab IV**

# **IPM Kabupaten Lebong**

<https://lebongkab.bps.go.id>



# **BAB 4**

## **IPM KABUPATEN LEBONG**

### **4.1. Perkembangan IPM Kabupaten Lebong 2012-2017**

Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menggambarkan kemajuan pembangunan manusia di suatu daerah dan merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam rangka mencapai kondisi yang ideal. Hasil penghitungan angka IPM Kabupaten Lebong ternyata termasuk dalam kategori sedang menurut skala internasional.

IPM Kabupaten Lebong tahun 2012 sebesar 62,84 meningkat pada tahun 2013 menjadi 63,15 meningkat pada tahun 2014 menjadi 63,90. Meningkat di tahun 2015 menjadi 64,72 meningkat menjadi 65,58 pada tahun 2016 dan meningkat lagi menjadi 65,87 pada tahun 2017. Pada enam tahun tersebut kategori sedang. Sama halnya dengan rata-rata penduduk Provinsi Bengkulu yang termasuk dalam tingkat pembangunan manusia sedang.

Nilai IPM Kabupaten Lebong sangat ditentukan oleh capaian tiga dimensi dasar pembangunan manusia. Dilihat dari peningkatannya, ternyata IPM dari komponen kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran per kapita mengalami kenaikan dalam lima tahun terakhir.

Tabel 6. Indeks Pembangunan Manusia dan Komponennya  
di Kabupaten Lebong Tahun 2012-2017

Kab/Provinsi	IPM					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lebong	62,84	63,15	63,90	64,72	65,58	65,87
Bengkulu	66,61	67,50	68,06	68,59	69,33	69,95

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan IPM per tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya. Pertumbuhan IPM Kabupaten Lebong tahun 2017 adalah sebesar 0.44 lebih rendah dibanding pertumbuhan pada tahun 2016 yang mencapai 1,32. Hal ini menggambarkan bahwa semakin lambat IPM Kabupaten Lebong untuk mencapai nilai maksimalnya.

#### 4.2. Perkembangan Komponen IPM Kabupaten Lebong

##### Angka Harapan Hidup (AHH)

Dalam hal perbandingan antar indikator komponen dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dapat dilakukan suatu tinjauan secara parsial, artinya tingkat pembangunan baru diukur dari satu komponen.

Pada tahun 2017 angka harapan hidup sejak lahir di Kabupaten Lebong adalah 62,46 tahun. Hal ini berarti setiap bayi yang baru lahir hidup di Kabupaten Lebong memiliki kemungkinan untuk hidup hingga umur 62,46 tahun. Angka harapan hidup penduduk Kabupaten Lebong pada tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016 yang memiliki AHH 62,39 tahun, artinya bahwa pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Lebong telah memberi dampak positif terhadap kualitas kesehatan masyarakat Lebong.

Tabel 7. Angka Harapan Hidup (AHH) dan Indeks Kesehatan Kabupaten Lebong Tahun 2012-2017

Kab/Provinsi	Angka Harapan Hidup (AHH)					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Lebong	62,00	62,00	62,01	62,31	62,39	62,46
Bengkulu	68,16	68,33	68,37	68,50	68,56	68,59

#### **Rata-rata Lama Sekolah (*Mean Years of Schooling/MYS*)**

Pada tahun 2013 hingga 2017 rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) penduduk Kabupaten Lebong menunjukkan adanya peningkatan, yaitu: 7,35 pada tahun 2013; 7,62 pada tahun 2014; 7,77 pada tahun 2015; 7,86 pada tahun 2016; menjadi 7,87 pada tahun 2017 dengan indeks sebesar 0,525 di tahun 2017. Angka ini menggambarkan bahwa dengan rata-rata bersekolah antara

7 sampai 8 tahun, berarti sumber daya manusia di Kabupaten Lebong masih tergolong rendah.

Tabel 8. Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah  
Kabupaten Lebong Tahun 2013-2017

KAB/ PROVINSI	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)					Harapan Lama Sekolah (Tahun)				
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
LEBONG	7,35	7,62	7,77	7,86	7,87	11,07	11,39	11,72	12,15	12,28
BENGKULU	8,09	8,28	8,29	8,37	8,47	12,78	13,01	13,18	13,38	13,57

#### Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling/EYS*)

Pada tahun 2013 hingga 2017 harapan lama sekolah (*expected years of schooling*) penduduk Kabupaten Lebong menunjukkan adanya peningkatan, yaitu: 11,07 pada tahun 2013; 11,39 pada tahun 2014; 11,72 pada tahun 2015; 12,15 pada tahun 2016; menjadi 12,28 pada tahun 2017 dengan indeks sebesar 0,682. Angka ini menggambarkan bahwa lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak umur 7 tahun ke atas di Kabupaten Lebong terus meningkat dan menunjukkan bahwa kondisi pembangunan sistem pendidikan terus meningkat.

Pada tahun 2017 Indeks Harapan Lama Sekolah sebesar 0,682; hal ini menunjukkan bahwa secara umum peluang anak berusia 7 tahun ke atas di Kabupaten Lebong untuk mencapai lamanya pendidikan hingga 18 tahun adalah

sebesar 68,20 persen. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan meningkatkan pembangunan sistem pendidikan di berberbagai jenjang.

Tabel 9. Indeks Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah dan Pendidikan Kabupaten Lebong Tahun 2013-2017

Kab/ Provinsi	Indeks Rata-rata Lama Sekolah					Indeks Harapan Lama Sekolah				
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	
Lebong	0,490	0,508	0,518	0,524	0,525	0,615	0,633	0,651	0,675	0,682
Bengkulu	0,539	0,552	0,552	0,558	0,565	0,710	0,723	0,732	0,743	0,753

Dari hasil penghitungan Indeks Rata-rata Lama Sekolah dan Indeks Harapan Lama Sekolah diperoleh suatu indeks gabungan, yaitu Indeks Pendidikan. Indeks ini mampu menggambarkan keberhasilan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Lebong. Besarnya Indeks Pendidikan di Kabupaten Lebong tahun 2017 mencapai 0,603 lebih tinggi dibanding tahun 2016 sebesar 0,599, lebih tinggi dibanding tahun 2015 mencapai 0,585, lebih tinggi dibanding tahun 2014 sebesar 0,570 dan tahun 2013 sebesar 0,552. Kondisi ini hampir sama dengan Indeks Pendidikan rata-rata penduduk Provinsi Bengkulu.

## Pengeluaran Per Kapita

Komponen standar hidup layak diukur dengan indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan (*UNDP menggunakan indikator PNB per kapita riil yang telah disesuaikan/adjusted real GNP per capita*) karena tidak tersedia indikator lain yang lebih baik untuk keperluan perbandingan antar negara. Besaran nilai Indeks Pengeluaran menunjukkan tingkat pendapatan penduduk di suatu daerah. Semakin besar nilai Indeks Pengeluaran mengindikasikan tingkat pendapatan yang semakin besar sehingga tingkat kesejahteraan penduduk semakin baik.

Tabel 10. Indikator dan Indeks Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan  
Kabupaten Lebong Tahun 2013-2017

Kab/ Provinsi	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Rp)					Indeks Pengeluaran				
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Lebong	10132	10210	10363	10682	10810	0,705	0,708	0,712	0,721	0,725
Bengkulu	8803	8864	9123	9492	9778	0,662	0,665	0,673	0,685	0,694

Pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Lebong terus meningkat dari tahun ke tahun, hal ini dapat dilihat melalui besaran pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan, pada tahun 2013 sebesar 10,132 juta rupiah meningkat pada tahun 2014 menjadi 10,210 juta rupiah, meningkat lagi pada tahun 2015 menjadi 10,363 juta rupiah. Pada tahun 2016 menjadi 10,682 juta rupiah dan akhirnya

menjadi 10,810 juta rupiah pada tahun 2017. Besaran tersebut menunjukkan adanya kecenderungan meningkatnya kemampuan daya beli masyarakat di Kabupaten Lebong.

Dalam hal perbandingan terhadap rata-rata penduduk Provinsi Bengkulu, baik tahun 2013 – 2017, kemampuan daya beli penduduk Kabupaten Lebong masih berada di atas rata-rata provinsi. Selain itu, pencapaian Indeks Pengeluaran juga mempunyai pola yang sama dengan indikator pengeluaran riil per kapita dengan perubahan indeks tahun 2013 (0,705), tahun 2014 (0,708), tahun 2015 (0,712), tahun 2016 (0,721), dan tahun 2017 (0,725)

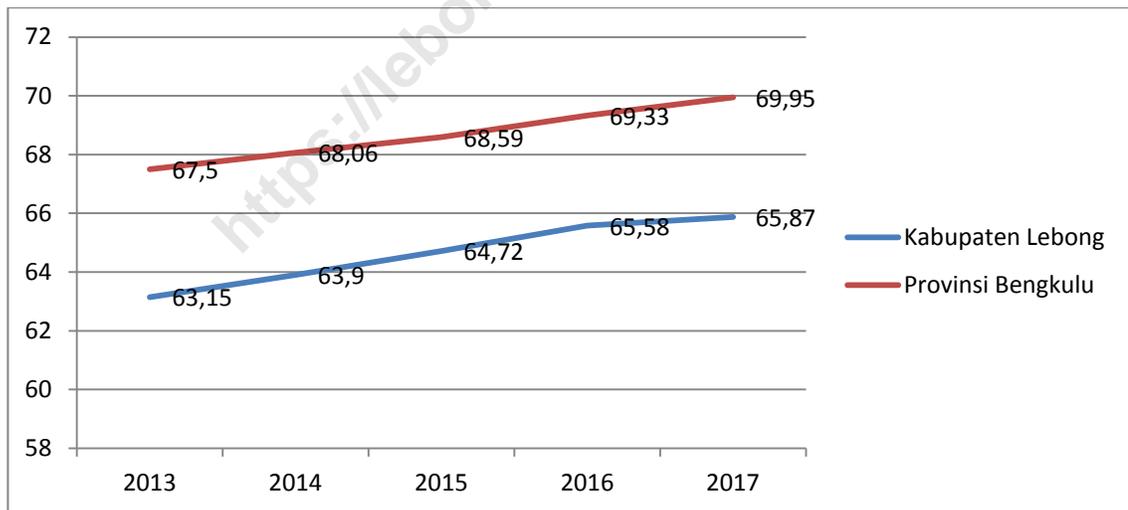
#### **4.3. Perbandingan IPM Antar Kabupaten/Kota**

Pada tahun 2017 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lebong berada pada peringkat ke-tujuh dari sepuluh kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu atau berada diperingkat yang sama apabila dibandingkan dengan tahun 2016 lalu. Angka IPM tertinggi adalah Kota Bengkulu yaitu sebesar 78,82; disusul oleh Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Rejang Lebong dengan angka IPM masing-masing sebesar 69,04 dan 68,61.

Apabila diperhatikan selama lima tahun terakhir, angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lebong terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Tahun 2013 angka IPM Kabupaten Lebong sebesar 63,15

menjadi 63,15 di tahun 2014 atau meningkat sebesar 1,19%. Kemudian di tahun 2015 menjadi 64,72 atau meningkat sebesar 1,28% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 angka IPM Kabupaten Lebong kembali mengalami peningkatan menjadi 65,58 atau naik sebesar 1,32% dan pada tahun 2017 angka tersebut meningkat menjadi 65,87 atau tumbuh sebesar 0,44%. Peningkatan angka IPM ini menjadikan Kabupaten Lebong berada diposisi kedua setelah Kabupaten Kepahiang untuk “*top movers*” atau pertumbuhan paling cepat diantara kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu.

Gambar 5. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lebong Tahun 2013-2017

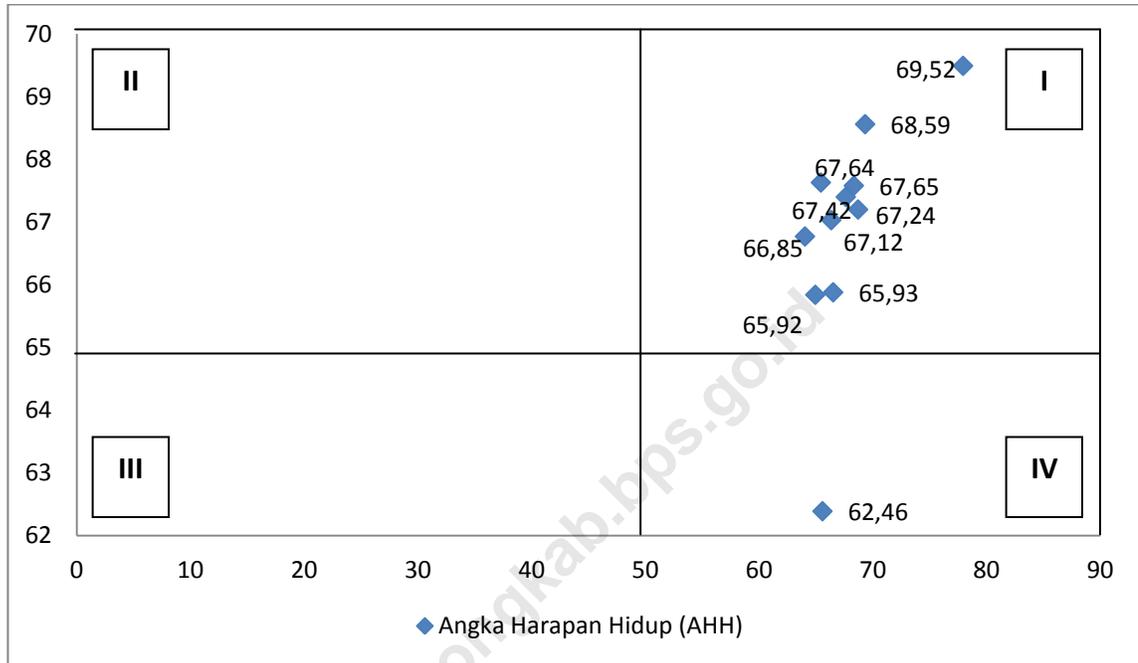


Tabel 11. Angka IPM dan Peringkat IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2017

Kode	Provinsi/Kabupaten	IPM		Peringkat	
		2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1700	BENGKULU	69,33	69,95	18	18
1701	Bengkulu Selatan	68,71	69,04	2	2
1702	Rejang Lebong	68,34	68,61	3	3
1703	Bengkulu Utara	67,63	67,80	4	4
1704	Kaur	64,95	65,28	9	9
1705	Seluma	64,04	65,00	10	10
1706	Mukomuko	66,52	67,07	5	5
<b>1707</b>	<b>Lebong</b>	<b>65,58</b>	<b>65,87</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
1708	Kepahiang	66,35	66,60	6	6
1709	Bengkulu Tengah	65,44	65,80	8	8
1771	Kota Bengkulu	77,94	78,82	1	1

Provinsi Bengkulu sendiri memiliki angka IPM di tahun 2017 sebesar 69,95 termasuk ke dalam provinsi yang memiliki angka IPM sedang dan berada pada peringkat 18 dari 34 provinsi di Indonesia. Bila dibandingkan dengan peringkat sebelumnya, posisi ini tidak mengalami peningkatan.

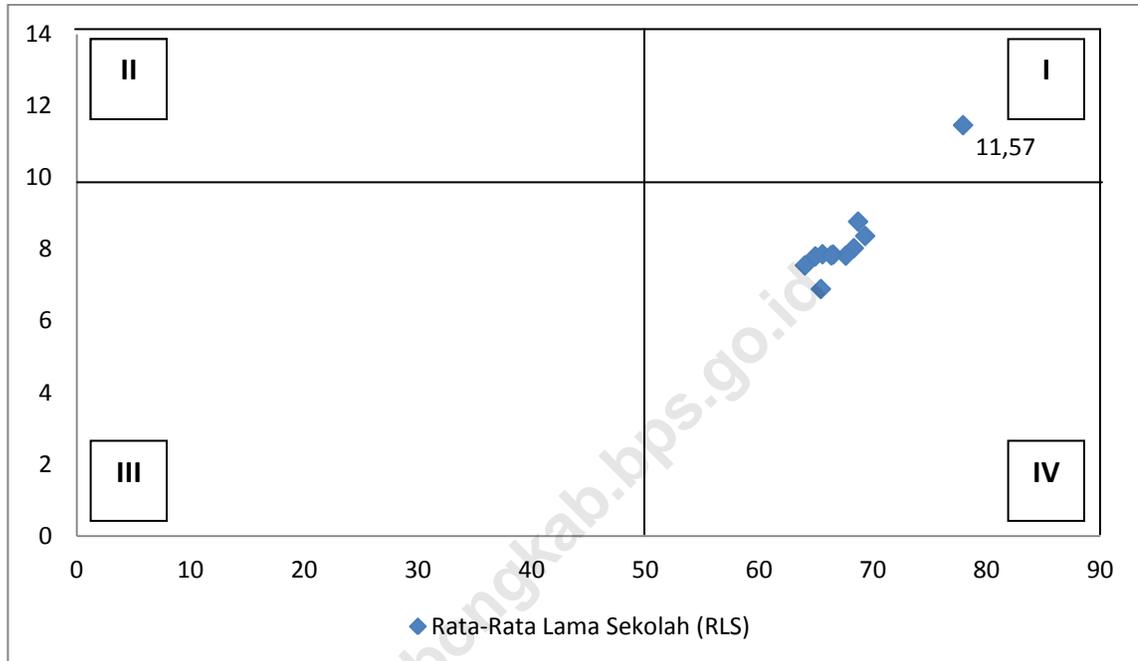
Gambar 6. Kuadran Angka Harapan Hidup (AHH) Antar Kabupaten/Kota Tahun 2017



Pada gambar 6, untuk kuadran Angka Harapan Hidup (AHH) antar kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu terhadap rata-rata peningkatan IPM tahun 2017 terlihat jelas bahwa AHH Kabupaten Lebong berada pada kuadran IV sedangkan AHH kabupaten/kota lain di Provinsi Bengkulu berada pada kuadran I. Artinya bahwa pertumbuhan Angka Harapan Hidup Kabupaten Lebong rendah dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rendah.

Gambar 7. Kuadran Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Antar Kabupaten/Kota

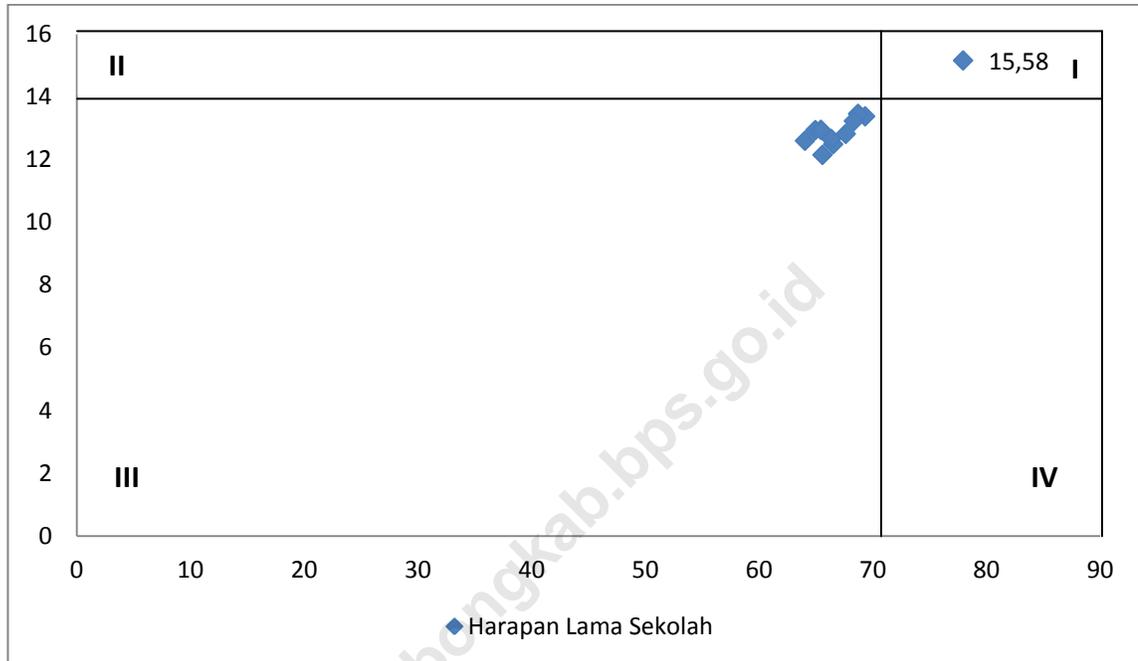
Tahun 2017



Berdasarkan gambar 7 untuk kuadran Rata-rata Lama Sekolah (RLS) antar kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu terhadap rata-rata peningkatan IPM tahun 2017 menunjukkan bahwa angka RLS Kabupaten Lebong berada pada kuadran IV atau sama dengan posisi RLS kabupaten/kota lain yang juga berada pada kuadran IV. Posisi RLS pada kuadran ini menunjukkan bahwa pertumbuhan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tinggi, tapi peningkatan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rendah. Sedangkan untuk RLS Kota Bengkulu berada pada kuadran I, pertumbuhan RLS tinggi dan peningkatan angka IPM juga tinggi.

Gambar 8. Kuadran Harapan Lama Sekolah (HLS) Antar Kabupaten/Kota

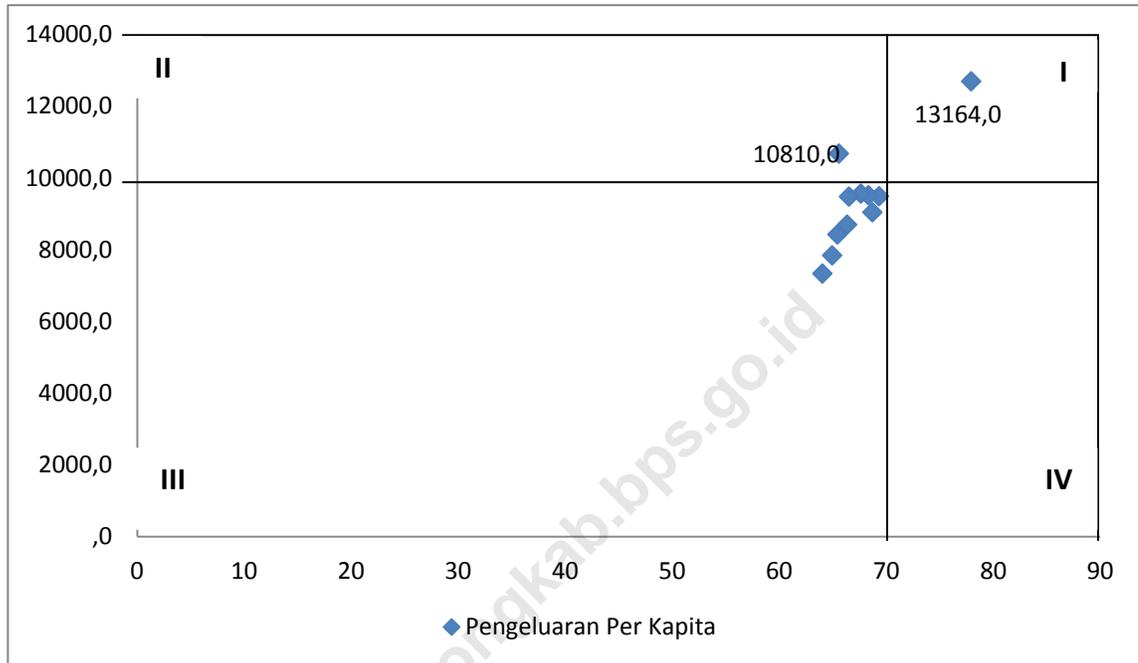
Tahun 2017



Jika diperhatikan pada gambar 8, terlihat jelas bahwa angka Harapan Lama Sekolah (HLS) untuk semua kabupaten di Provinsi Bengkulu berada pada kuadran III kecuali angka HLS Kota Bengkulu yang berada pada kuadran I. Posisi pada kuadran III menunjukkan bahwa pertumbuhan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di kabupaten rendah dan peningkatan terhadap angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga rendah. Berbeda dengan angka HLS Kota Bengkulu yang berada pada kuadran I yang artinya pertumbuhan angka HLS tinggi dan peningkatan IPM tahun 2017 juga tinggi.

Gambar 9. Kuadran Pengeluaran Per Kapita Antar Kabupaten/Kota

Tahun 2017



Komponen pengeluaran per kapita Kabupaten Lebong jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Bengkulu berada pada kuadran II, artinya bahwa pertumbuhan pengeluaran per kapita rendah tapi peningkatan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tinggi. Berbeda dengan pengeluaran per kapita kabupaten lain di Provinsi Bengkulu yang berada pada posisi kuadran III yang menunjukkan bahwa bahwa pengeluaran per kapita rendah dan peningkatan angka IPM juga rendah. Akan tetapi untuk Kota Bengkulu, komponen pengeluaran per kapita berada pada posisi kuadran I.



# **Bab V**

# **Penutup**

---

<https://lebongkab.bps.go.id>



# BAB 5

## PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

Pembangunan manusia di Kabupaten Lebong pada tahun 2017 relatif lebih baik jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ini dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lebong pada tahun 2017 (65,87) yang mengalami pertumbuhan sebesar 0,44 dibandingkan tahun 2016 (65,58).

Pada tahun 2017, Angka Harapan Hidup penduduk Kabupaten Lebong adalah 62,46 yang berarti rata-rata umur penduduk sampai dengan meninggal adalah 62,46 tahun. Rata-rata Lama Sekolah adalah 7,87 yang berarti rata-rata penduduk bersekolah antara 7-8 tahun. Harapan Lama Sekolah adalah 12,28 yang berarti lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh anak 7 tahun ke atas adalah 12,28 tahun.

Berdasarkan peringkat IPM, Pada tahun 2017 Kabupaten Lebong berada pada peringkat ke-tujuh dari sepuluh kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu. Selain itu, besaran IPM Kabupaten Lebong pada tahun 2017 termasuk kategori sedang, sama halnya dengan IPM Provinsi Bengkulu yang juga termasuk kategori sedang.

Oleh karena itu, dengan melihat angka IPM ini dapat dijadikan indikator dalam mengevaluasi jalannya pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lebong.

## **5.2. Implikasi Kebijakan**

Dengan melihat hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan komponen-komponen penyusunnya, dapat dibuat sebuah rancangan mengenai peningkatan kesejahteraan penduduk melalui upaya peningkatan kesehatan dan pendidikan secara umum. Dan untuk peningkatan daya beli penduduk merupakan dampak berantai dari peningkatan kesehatan dan pendidikan penduduk secara berkesinambungan.

Peningkatan kesehatan penduduk dapat dilakukan dengan cara :

1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai cara hidup sehat, berupa upaya pencegahan dan upaya pengobatan baik tradisional maupun modern.
2. Meningkatkan ketersediaan obat-obatan modern yang terjangkau oleh masyarakat.
3. Meningkatkan ketersediaan layanan kesehatan terutama berupa revitalisasi Posyandu dan layanan Puskesmas baik keliling maupun biasa.
4. Menggalakkan program-program yang mampu menekan angka kematian bayi dan meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak.

5. Memperbaiki mutu lingkungan hidup atau pemukiman sekaligus menanamkan kepada masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan pemukiman untuk mengurangi penyebaran penyakit.

Peningkatan pendidikan dapat dilakukan dengan cara :

1. Penajaman sasaran wajib belajar sembilan tahun melalui berbagai jalur.
2. Khusus mengenai upaya pemberantasan buta huruf melalui kejar Paket A, agar dapat dijaga kemampuan peserta yang telah lulus dengan adanya kegiatan lanjutan seperti kelompok pembaca. Dengan demikian, kemampuan membaca dapat tetap terjaga di samping merupakan upaya pembekalan ilmu pengetahuan yang berkesinambungan.
3. Penyediaan dan penyebaran guru berdedikasi dan berkualitas perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah karena guru merupakan tulang punggung bagi pembentukan pelajar yang berkualitas.
4. Adanya peningkatan sarana dan prasarana transportasi sebagai penunjang akses masyarakat dalam menjangkau pendidikan formal.

Dalam hal perekonomian, perbaikan terhadap daya beli masyarakat tidak terlepas dari peningkatan pendapatan. Jika peningkatan mutu kesehatan dan pendidikan terjadi secara berkesinambungan, hal ini berarti juga telah terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang nantinya diharapkan terciptanya generasi-generasi muda yang siap bersaing di era globalisasi.

Selain itu juga, peningkatan pendapatan juga tidak terlepas dari berkembangnya dunia usaha dan semakin baiknya iklim investasi untuk menciptakan peluang-peluang usaha. Untuk itu, hendaknya pemerintah Kabupaten Lebong mampu menjadi pemicu berkembangnya perekonomian daerah dengan menghidupkan dunia usaha pada berbagai sektor ekonomi dengan melihat potensi daerah yang dimiliki.

<https://lebongkab.bps.go.id>

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA

<https://lebongkab.bps.go.id>

ISBN 978-602-6853-94-3



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN LEBONG**

Jl. Dua Jalur Komplek Perkantoran, Tubei  
Website :lebongkab.bps.go.id, e-mail